

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI PAPUA

Kepada Yang Terhormat
Ketua DPRD Papua
Di JAYAPURA

Hal: pertimbangan PGGP mengenai pembentukan Tim Investigasi untuk Kasus Mulia.

Dengan hormat,

Menanggapi peristiwa kekerasan yang terjadi di Mulia sejak 17 Agustus 2004 yang lalu, pemimpin Gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Papua mengadakan pembahasan khusus tanggal 29 Oktober 2004 di Kantor Keuskupan Jayapura. PGGP menyatakan sikap keprihatinan yang mendalam terhadap peristiwa yang melawan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi ancaman serius bagi usaha kita bersama untuk mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai.

PGGP mendukung tuntutan masyarakat luas agar kebenaran menyangkut seluruh peristiwa diungkapkan secara akurat dan tuntas sehingga keadilan dapat ditegakkan. Karena itu, gagasan pembentukan Tim Investigasi untuk Mulia adalah hal yang kami dukung sepenuhnya.

Namun demikian, PGGP memiliki beberapa pertimbangan mendalam mengenai isi dan susunan tim investigasi ini demi menjawab tuntutan keadilan dari masyarakat dan terutama keluarga korban.

Pertama, mengingat bahwa perkara Mulia menuntut keahlian penyelidikan yang tinggi (termasuk kemungkinan penyelidikan forensik) dan kewenangan hukum yang jelas, kami mengusulkan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) **segera membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM)** untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara Mulia berdasarkan kewenangan hukum yang dimilikinya.

Kedua, mengingat usulan pembentukan tim investigasi yang diusulkan memiliki jumlah besar (33 orang) dari 16 komponen namun wewenang hukum, ketrampilan teknis profesional, dan efektifitas kerja terbatas, kami khawatir bahwa kinerja dan hasil penyelidikan Tim Investigasi sedemikian jutu dapat menjadikan masalah Mulia ini berkepanjangan sementara kepentingan korban tidak dilayani semestinya karena begitu banyak kepentingan yang bermain di dalam tim yang direncanakan. Berbagai komponen masyarakat yang sedianya menjadi anggota Tim Investigasi kami usulkan untuk dipisahkan dari tim investigasi karena **mereka justru akan menjadi kontrol publik yang amat perlu untuk memastikan agar proses penanganan perkara Mulia berjalan sesuai hukum yang berlaku dan hak-hak asasi manusia.**

Ketiga, menanggapi suasana cemas, takut, dan tidak pasti di Mulia khususnya dan wilayah Pegunungan Tengah pada umumnya, kami memandang perlu untuk

membentuk **Tim Pastoral Perdamaian yang HANYA berisikan para pemimpin agama** untuk berkunjung ke Mulia dan Wamena guna mendengar keluhan, harapan, dan keadaan umat seluruhnya. Kami yakin bahwa masyarakat sedang membutuhkan sapaan pastoral sehingga layak dan pantas jika Para Pemimpin Agama melayani kepentingan masyarakat ini.

Keempat, mengingat bahwa kaum korban baik di Mulia maupun di Wamena perlu mendapat perhatian serius, kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi membentuk **Tim Medis dan Bantuan Kemanusiaan yang memiliki akses seluas-luasnya** kepada masyarakat korban di Wamena dan Mulia tanpa membeda-bedakan golongan, agama, latarbelakang budaya, status sosial, dan paham politik.

Demikian pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan memberi kita damai!

Dikeluarkan di Jayapura
3 November 2004

Hardus Desa
Sekretaris PGGP

Tembusan :

1. Para Anggota PGGP
2. Gereja-gereja lain di Papua
3. Para Pemimpin Agama di Papua
4. Gubernur Papua
5. Kapolda Papua
6. Pangdam XVII/ Trikora